

**PENGARUH RISIKO LITIGASI DAN *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KEBERADAAN AHLI
AKUNTANSI DALAM KOMITE AUDIT**
(STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BEI 2009-2011)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

SAESAR ADHIDEWANTO

NIM. C2C008128

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Saesar Adhidewanto
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008128
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH RISIKO LITIGASI
DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KEBERADAAN
AHLI AKUNTANSI DALAM KOMITE
AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA
PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BEI 2009-2011)**
Dosen Pembimbing : Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si.,Akt.

Semarang, 4 April 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si.,Akt)

NIP : 19720421 200012 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Saesar Adhidewanto

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008128

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH RISIKO LITIGASI
DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KEBERADAAN
AHLI AKUNTANSI DALAM KOMITE
AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA
PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BEI 2009-2011)**

Dosen Pembimbing : Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si.,Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 April 2013

Tim Penguji

- 1 Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si., Akt. (.....)
- 2 Andri Prastiwi, SE., M.Si., Akt. (.....)
- 3 Prof. Dr. H., Abdul Rohman S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Saesar Adhidewanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH RISIKO LITIGASI DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBERADAAN AHLI AKUNTANSI DALAM KOMITE AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2009-2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan jasa yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 April 2013

Yang membuat pernyataan,

(Saesar Adhidewanto)

NIM : C2C008128

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara resiko litigasi dan mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan pemegang saham, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, rasio kecukupan modal (CAR) dan auditor eksternal big 4 dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit sebuah perbankan.

Dengan metode purposive sampling, didapat 69 perbankan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2011. Data penelitian dianalisis menggunakan uji asumsi klasik dan hipotesis-hipotesis yang ada dianalisis menggunakan model regresi linear.

Hasil penelitian membuktikan bahwa risiko litigasi yang dianggap sebagai faktor eksternal dan dewan komisaris independen sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* memiliki hubungan signifikan terhadap keberadaan ahli keuangan akuntansi dalam komite audit. Namun demikian, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara mekanisme *corporate governance* yang lain yaitu kepemilikan pemegang saham, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, rasio kecukupan modal (CAR) dan auditor eksternal big 4 dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit sebuah perbankan.

Kata kunci : komite audit, ahli keuangan akuntansi, resiko litigasi, perbankan, *corporate governance*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine association between litigation risk and corporate governance mechanisms consisting of the ownership of controlling shareholders, foreign ownership, government ownership, board size, the size of board commissioners, independent commissioners, capital adequacy ratio (CAR) and the external auditor Big 4 with the proportion of accounting financial experts within banking firm's audit committee.

Based on purposive sampling method, 69 banking firms which consistently have been listing in Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2009-2011 are obtained. The data was analyzed with classic assumption test and the hypotheses were examined using linear regression model.

The result of this study provides evidence that litigation risk which is considered as external factor and independent commissioners as a part of corporate governance mechanisms significantly associated with proportion of accounting financial experts within banking firm's audit committee. However, the other corporate governance mechanisms which are the ownership of controlling shareholders, foreign ownership, government ownership, board size, the size of board commissioners, capital adequacy ratio (CAR) and the external auditor Big 4 have no significant association with proportion of accounting financial experts within audit committee.

Keywords: audit committee, accounting financial expert, litigation risk, banking firm, corporate governance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Risiko Litigasi dan Corporate Governance Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi Dalam Komite Audit” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang dan didikan yang telah diberikan, walaupun engkau telah tiada semoga semua usaha ini masih terus membuatmu bangga dan bahagia di sana. Kakakku tercinta satu-satunya Any, yang terus memberikan dukungan dan semangat tanpa lelah, serta seluruh keluarga besar penulis.
2. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, SE., M.Si.,Akt., selaku dosen pembimbing atas ilmu, waktu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, SE., M.Si.,Akt., selaku Kepala Jurusan Akuntansi yang juga telah memberikan arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.

4. Bapak Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D selaku dosen wali yang telah banyak membantu pelaksanaan perkuliahan akademik.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh staf karyawan.
7. Eka Tjipta Foundation, Mba Dina, Mas Wawan yang telah memberikan dukungan yang tak ternilai bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan akuntansi 2008, Ichlasia, Indra Wahyu yang telah memberikan inspirasi dan banyak bantuan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, April 2013

Penulis

Saesar Adhidewanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Agency Theory	12
2.1.2 Resource Dependence Theory.....	15
2.1.3 Komite Audit.....	16
2.1.4 Risiko Litigasi	20
2.1.3 Corporate Governance	22
2.1.3 Penelitian Terdahulu	30
2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian	35
2.3 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel penelitian dan definisi operasional	46
3.1.1 Variabel independen	47
3.2 Populasi dan sampel	53
3.3 Jenis dan sumber data	53
3.4 Teknik pengumpulan data	54
3.5 Metode analisis	54
3.6 Pengujian penyimpangan asumsi klasik	53
3.6.1 Uji Normalitas	55
3.6.2 Uji Multikolinearitas	56
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas	56
3.6.4 Uji Gleyser	57

3.6.5 Uji Autokorelasi	58
3.7 Pengujian hipotesis	59
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	61
4.2 Analisis Data	62
4.2.1 Statistik Deskriptif	62
4.3 Interpretasi Hasil	68
4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	68
4.3.2 Analisis Regresi	76
4.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis	80
4.4 Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	94
5.3 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu	31
TABEL 3.1 Kriteria Uji Autokorelasi.....	58
TABEL 4.1 Cara Pemilihan Sampel	62
TABEL 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	63
TABEL 4.3 Deskripsi Dummy Variabel.....	66
TABEL 4.4 Uji Normalitas Masing-Masing Variabel (Awal).....	68
TABEL 4.5 Identifikasi Outlier	69
TABEL 4.6 Identifikasi Outlier 2	69
TABEL 4.7 Uji Normalitas Multivariate	71
TABEL 4.8 Uji Multikolinearitas	72
TABEL 4.9 Uji Heteroskedastisitas Model Regresi	74
TABEL 4.10 Uji Autokorelasi Model Regresi	75
TABEL 4.11 Uji F Model Regresi.....	76
TABEL 4.12 Koefisien Determinasi Model Regresi	77
TABEL 4.13 Uji t Model Regresi	78
TABEL 4.14 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	35
Gambar 4.1 Uji Normalitas Multivariate	71
Gambar 4.2 Grafik Scatterplot	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Sampel Penelitian Tahun 2009-2011	98
Lampiran B Data Sampel Penelitian Tahun 2009-2011	100

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian. Uraian dalam bab ini ditujukan bagi pembaca agar lebih memahami mengenai penelitian yang dilakukan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan *go public*, dengan kata lain perusahaan yang sudah terdaftar atau *listing* di bursa efek berkewajiban untuk memiliki komite audit yang independen yang memiliki kewenangan untuk berhubungan dengan konsultan independen dalam menjalankan tugasnya (Sarbanes-Oxley Act Of 2002). Di Indonesia keharusan untuk membentuk komite audit dinyatakan dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek No. Kep-315/BEJ/06/2000 yang mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (kini bursa efek Indonesia) memiliki Komite Audit. Khusus bagi perbankan, kewajiban membentuk komite audit ditegaskan kembali dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate governance* Bagi Bank Umum.

Selanjutnya, dalam pembentukan komite audit diperlukan kualifikasi khusus bagi kandidat potensial yang dicalonkan. Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 mensyaratkan bahwa anggota komite audit minimal terdiri dari tiga orang yang terdiri dari ketua komite audit yang juga sebagai anggota atau ketua dewan komisaris dan dua lainnya adalah pihak independen dari luar emiten. Selain itu, salah seorang anggotanya diwajibkan untuk memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Hal tersebut dikarenakan perbankan yang memiliki anggota komite audit dengan karakteristik sumber daya manusia tertentu akan dapat meminimalisasi ketidakpastian lingkungan dengan pengetahuan, keahlian dan pengalamannya khususnya dalam bidang *accounting*, (Alfiah, 2010).

Beberapa studi terkini memberikan bukti yang mendukung pendapat tersebut;. Bedard, *et al.* (2004), Krishnan (2005), dan Dhaliwal, *et al.* (2006) melaporkan bahwa kehadiran ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit berhubungan dengan manajemen laba yang lebih rendah serta *internal control* yang lebih baik. DeFond, *et al.* (2005) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pasar bereaksi positif terhadap penunjukan ahli keuangan ke dalam komite audit. Fakta-fakta tersebut membuat keahlian di bidang keuangan khususnya akuntansi menjadi faktor penting dalam menilai kompetensi suatu komite audit. Dengan keahlian tersebut, diharapkan dampak ketidakpastian dalam lingkungan bisnis, salah satunya yaitu timbulnya risiko litigasi atau penuntutan hukum dari *shareholders* dan *stakeholder* dapat terminimalisir.

Risiko litigasi perbankan adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko litigasi sebagai faktor kondisional, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum. Investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan (Juanda, 2010). Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum dapat terjadi di seluruh aspek transaksi yang ada di bank, termasuk pula dengan kontrak yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak lain dan dapat berdampak terhadap risiko-risiko lain antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko reputasi dan risiko likuiditas. Francis *et al.* (1994), Johnson *et al.* (2001), Rogers dan Stocken (2005) yang meneliti faktor determinan pemicu risiko litigasi menyimpulkan bahwa kapitalisasi pasar, beta saham dan perputaran volume saham secara positif berhubungan dengan probabilitas terjadinya tuntutan hukum.

Sebuah perbankan yang beroperasi pada lingkungan dengan potensi litigasi yang tinggi diprediksi memiliki permintaan terhadap ahli keuangan dari bidang akuntansi (*Accounting Financial Expertise*). Namun demikian, risiko litigasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat membuat ahli tersebut enggan mengisi posisi dalam suatu komite audit Krishnan dan Lee (2006). Maka dari itu penentuan hubungan asosiasi yang seimbang antara risiko litigasi dan keberadaan ahli keuangan

akuntansi dalam komite audit menjadi penting untuk dilakukan sebagai suatu investigasi empiris.

Latar belakang terbentuknya komite audit adalah penerapan *corporate governance* oleh perusahaan. Dikarenakan keberadaan komite audit merupakan mekanisme dari aplikasi *corporate governance* itu sendiri, susunan atau karakteristik komite audit dapat digunakan sebagai tolok ukur keandalan dari sebuah laporan keuangan atau informasi yang disediakan oleh suatu perusahaan (Bedard, *et al.* 2008). *Corporate governance* yang relatif kuat berhubungan dengan keberadaan *accounting financial expertise*/ahli akuntansi dalam komite audit. Ahli akuntansi berperan dalam melengkapi kekuatan *governance* dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham (Defond, *et al.* 2005).

Penerapan *good corporate governance* juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan (Sari, 2010). Apalagi sejak terjadinya krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian. Salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional.

Melihat kondisi bermasalah tersebut, pada tahun 2004 melalui Bank Indonesia (BI) pemerintah melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Arsitektur

Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupakan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

Sari (2010) membagi mekanisme *corporate governance* perbankan menjadi empat pokok yaitu:

- a) Mekanisme Pemantauan Kepemilikan, meliputi : kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah.
- b) Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, meliputi : ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan komisaris independen.
- c) Mekanisme Pemantauan Regulator yaitu besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- d) Mekanisme Pemantauan Pengungkapan yaitu kompetensi auditor eksternal yang dipekerjakan (*Auditor Eksternal Big Four*)

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pertama, obyek penelitian yang diambil adalah berasal dari perbankan, seperti yang telah diketahui perbankan merupakan penopang sektor moneter sehingga keberlangsungan perbankan menjadi hal yang penting. Selain itu untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat

atas perbankan maka seluruh informasi (khususnya laporan keuangan) harus benar – benar mencerminkan realita yang ada. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem pengendalian dan *monitoring* yang kuat salah satunya melalui komite audit.

Kedua, di Indonesia (dalam negeri) masih jarang penelitian atau sumber referensi yang menghubungkan variabel resiko litigasi dengan keberadaan ahli keuangan dalam suatu komite audit. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai faktor internal perusahaan seperti ukuran dewan, rasio kecukupan modal dan lain-lain daripada faktor eksternal yaitu resiko litigasi. Penelitian ini mengacu pada penelitian Jagan Krishnan, *et.al* (2009) dengan obyek penelitian perbankan yang terdaftar/ *listing* di BEI yang telah secara konsisten menerbitkan *annual report* berturut-turut dalam rentang waktu dua tahun dari 2009 hingga 2011.

Ketiga, penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terkait baik faktor internal maupun faktor eksternal sebagai variabel independen. Faktor internal yang diteliti meliputi mekanisme *corporate governance* sedangkan untuk faktor eksternal yang diteliti adalah resiko litigasi.

Penelitian ini identik dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Alfiah (2010) yang menganalisis hubungan resiko litigasi dan *corporate governance* terhadap *financial expertise* komite audit. Perbedaannya adalah penelitian ini memilih objek yang lebih spesifik yaitu perusahaan perbankan dan menggunakan

variabel yang terkait dengan pengukuran *corporate governance* perbankan secara khusus.

Sesuai dengan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, peneliti ingin mengkaji penelitian yang berjudul **“PENGARUH RISIKO LITIGASI DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBERADAAN AHLI AKUNTANSI DALAM KOMITE AUDIT PERBANKAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Resiko Litigasi dan *Corporate governance* yang Dimiliki Perbankan Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Auditnya”. Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka dalam penelitian ini diuraikan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?
2. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa besar pemegang saham pengendali berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?
3. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?

4. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?
5. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?
6. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?
7. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa komisaris independen berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?
8. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa Capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?
9. Apakah mekanisme *corporate governance* berupa auditor eksternal big 4 berpengaruh terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh resiko litigasi dari sebuah bank terhadap keberadaan ahli keuangan akuntansi dalam komite auditnya.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yang melekat pada sebuah bank meliputi Mekanisme Pemantauan Kepefnilikan, Mekanisme Pemantauan Internal Control , Mekanisme Pemantauan Regulator dan Mekanisme Pemantauan pengungkapan terhadap keberadaan ahli keuangan akuntansi dalam komite auditnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1 Bagi perusahaan khususnya perbankan untuk lebih siap menghadapi resiko litigasi yang dihadapi dengan memastikan komite auditnya memiliki kompetensi yang cukup.
- 2 Bagi perusahaan khususnya perbankan yang terdaftar di BEI untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan sehingga lebih dipercaya oleh investor/calon investor.
- 3 Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai pembahasan *corporate*

governance, resiko litigasi dan keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan untuk diteliti, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka menyajikan tentang teori serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan teori baik dalam membantu merumuskan fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data atau membahas temuan-temuan penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga akan memuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menyajikan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam proses penelitian. Secara garis besarnya, metode penelitian ini berisi tentang variabel penelitiandan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bagian keempat berisi analisis data. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis hasil penelitian secara keseluruhan dari penelitian ini yang selanjutnya dihubungkan dengan ketercapaian ataupun tidaktercapaian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya serta argumen-argumen yang mendukungnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bab yang kedua, yaitu telaah pustaka berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian. Definisi-definisi yang ada bab ini bertujuan agar pembaca penelitian ini lebih mengenal seluk beluk permasalahan yang diteliti.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (1995) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Agency theory mengemukakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menyebabkan konflik. Konflik tersebut dikarenakan *principal* yang diwakili oleh *share holder* dan *agent* yang direpresentasikan oleh manajer dan direksi memiliki perbedaan kepentingan. Keinginan, motivasi dan kepentingan yang tidak

sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi (Sar, 2010).

Menurut Suparlan dan Andayani (2010) dalam *agency theory* terdapat tiga konflik kepentingan antara pihak- pihak yang terkait, yaitu: (1) antara *shareholders* dan manajer, (2) antara *shareholders* dan *debtholders*, dan (3) antara manajer, *shareholders* dan *debtholders*. Pada tingkatan yang lebih lanjut , konflik tersebut dapat mengakibatkan pergantian manajemen (Sinarwati, 2010).

Karena hal tersebut maka dalam pengelolaan perusahaan diperlukan organ independen sebagai pemegang fungsi *monitoring* dan pengendalian. Independensi diperlukan agar ketika bekerja organ tersebut tidak hanya merepresentasikan salah satu pihak saja. Tidak hanya mewakili kepentingan manajer tapi juga tidak hanya mengejar keuntungan bagi *shareholders* saja. Oleh karena itu, pembentukan komite audit menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati, dkk 2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi.

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan

Corporate governance berperan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagaisarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Oktapiyani, 2009 dalam Sari, 2010).

2.1.2 Resource Dependence Theory (RDT)

Teori yang digunakan untuk menganalisis peran ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit adalah *resource dependence theory* (RDT) atau teori ketergantungan terhadap sumber daya. RDT dikemukakan oleh Jeffrey Pfeffer dan G.R. Salancik (1978), yang menyatakan bahwa ada suatu ketergantungan perusahaan terhadap pihak di luar perusahaan dalam menghadapi rintangan eksternal. Pihak di luar perusahaan pada penelitian ini merujuk pada ahli keuangan dari bidang akuntansi dan rintangan eksternal direpresentasikan oleh resiko litigasi.

Pfeffer menyimpulkan bahwa ukuran dan komposisi dewan bukanlah terbentuk secara acak atau merupakan suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan merupakan respon perusahaan secara rasional terhadap kondisi lingkungan eksternal perusahaan (Hillman *et all* 2009). Hal ini sejalan dengan pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perbankan yang bergerak dalam lingkungan dengan risiko litigasi yang tinggi diperkirakan akan memiliki permintaan yang lebih terhadap ahli keuangan dari bidang akuntansi untuk mengisi posisi komite audit.

Manfaat yang diperoleh dari struktur sumber daya manusia yang efektif seperti struktur komite audit dan dewan komisaris, tidak hanya terbatas pada aspek operasional dan organisasional, tetapi dapat juga terkait dengan masalah kemungkinan terjadinya penuntutan pengadilan

/litigasi (Alfiah, 2010). Berdasarkan teori ini, ahli keuangan dari bidang akuntansi diperlukan oleh perusahaan sebagai respons terhadap ketidakpastian dari lingkungan eksternal. Komite audit yang berisikan ahli keuangan dari bidang akuntansi diharapkan dapat menjalankan fungsi monitoring yang lebih baik sehingga ketidakpastian eksternal, seperti kemungkinan adanya tuntutan litigasi dapat terminimalisir

2.1.3 Komite Audit

a. Pengertian Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Ramdan, 2009). Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris,

bantuan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dan tugas penting lainnya yang berkaitan dengan system pelaporan keuangan (Baridwan, 2002).

b. Peran Komite Audit

Kasus penipuan dan kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan oleh manajemen telah mendorong profesi akuntansi, pemakai laporan keuangan dan pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya peran komite audit dalam usaha peningkatan kualitas laporan keuangan (Ramdan, 2009). Melalui Keputusan Ketua BAPEPAM nomor kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 beserta lampirannya (Peraturan Nomor IX.I.5) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menegaskan kembali tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturanperundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundangundanganlainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditorinternal.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduanyang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Audit diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

c. Keanggotaan Komite Audit

Keputusan Ketua BAPEPAM nomor kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 beserta lampirannya (Peraturan Nomor IX.I.5) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga merinci keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.

7. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan
10. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

2.1.4 Risiko Litigasi

Risiko litigasi diartikan sebagai resiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi kreditor, investor, dan regulator. Risiko litigasi dapat diukur dari berbagai indikator keuangan yang menjadi faktor penentu kemungkinan terjadinya litigasi. Akhir-akhir ini, risiko litigasi terhadap perusahaan karena kesalahan pelaporan keuangan sering terjadi pada perusahaan-perusahaan go public (Juanda, 2008). Bahkan, intensitas risiko litigasi semakin tinggi ketika penegakan hukum

(*law enforcement*) dalam suatu lingkungan pasar modal dijalankan dengan baik.

Tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Investor bisa bertindak sebagai penuntut bila manajer memberikan laporan keuangan yang tidak relevan, yang berakibat bisa merugikan di pihak investor. Laporan keuangan merupakan dasar pijakan utama untuk melakukan tuntutan hukum. Beberapa kesalahan dalam pelaporan karena ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan penundaan informasi negatif akan mudah dijadikan bahan tuntutan (Juanda, 2008).

Francis *et al.* (1994), Johnson *et al.* (2001), Rogers dan Stocken (2005) dalam Krishnan dan Lee (2009) yang meneliti faktor determinan pemicu litigasi menyimpulkan bahwa kapitalisasi pasar, beta saham dan perputaran volume saham secara positif berhubungan dengan probabilitas terjadinya tuntutan hukum.

Dikarenakan luasnya konsekuensi dari resiko tersebut, maka perusahaan dituntut seminimal mungkin mengurangi peluang resiko litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan fungsi *monitoring* dan pengendalian perusahaan melalui komite audit.

2.1.5 Corporate Governance

a. Pengertian Corporate Governance

Istilah *Corporate governance* pertama kali dikemukakan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 (Juanda, 2008). Istilah tersebut muncul pada Cadbury Report. Cadbury Report mendefinisikan *corporate governance* sebagai “*the system by which organizations are directed and controlled*”. Cadbury Report memandang *corporate governance* sebagai perangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Sementara *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) 2004 mendefinisikan *Corporate governance* sebagai berikut:

“*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance*”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* erat kaitannya dengan fungsi monitoring dan pengendalian dari suatu perusahaan. Karena dengan fungsi monitoring dan pengendalian yang baik, maka tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai.

b. Perkembangan Corporate Governance

Sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate governance* (GCG) kian populer. Bahkan, GCG menjadi jaminan mutu dari penilaian suatu perusahaan (Ramdan, 2009). Hal tersebut dikarenakan GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam mewujudkan “*Long term viability*” atau keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Selain itu krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini disebabkan oleh kegagalan penerapan GCG menjadi pemicu “*booming*” GCG itu sendiri.

c. Tujuan dan Manfaat Corporate Governance

GCG bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang akan merugikan para pemegang saham, misalnya karena ekspektasi yang berlebihan dalam menilai kinerja perusahaan

(Ramdan 2009). Beberapa manfaat dari penerapan GCG yang bisa diambil oleh perusahaan menurut *The Indonesian Institute for Corporate governance* (2000):

- 1 Meminimalkan *agency cost*
- 2 Meminimalkan *cost of capital*
- 3 Meningkatkan nilai saham perusahaan
- 4 Mengangkat citra perusahaan

d. Prinsip-Prinsip Umum mengenai Corporate governance

Pada tahun 2004 *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mengeluarkan prinsip-prinsip mengenai *Corporate governance* yang menjadi acuan masyarakat internasional dalam pengembangan *Corporate governance*, namun OECD menjelaskan tidak satu model pengembangan *Corporate governance* yang cocok untuk semua negara, masing masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh adalah perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan (Ramdan, 2009).

Beberapa negaramenggunakan *one tier system* dimana pengawas perusahaan disebut “*Board*” dan pengurus perusahaan disebut “*Key Executives*”. Sementara itu banyak juga negarayang menggunakan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukanoleh “*Board of*

Commissoner” dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh “*Directors*”. Indonesia menggunakan *two tier system*, sehingga istilah “*Board*” dalam OECD diartikan sebagai “Dewan Komisaris, dan “*Key Executives*” sebagai “Direksi”.

Prinsip-prinsip umum dalam menjalankan GCG menjadi lima unsur, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* atau yang disingkat TARIF. Syakhroza (2002) dalam Ramdan (2009) menjelaskannya sebagai berikut:

1. *Transparency* (transparansi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai keadaan perusahaan. Prinsip ini mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), prinsip ini menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Melalui fungsi komite audit untuk menunjang akuntabilitas perusahaan

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip ini memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (keadilan), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan tidak memihak kepentingan yang lain.

e. Mekanisme Pemantauan Corporate Governance

Sari (2010) membagi mekanisme *corporate governance* perbankan menjadi empat pokok yaitu:

1 Mekanisme Pemantauan Kepemilikan

- Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali.

Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Lastanti (2004) menunjukkan bahwa *larger shareholders* (pemegang saham pengendali) dapat lebih banyak melakukan monitoring terhadap pihak manajemen perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Adanya monitoring yang cukup tinggi dapat menekan kemungkinan manajer mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya.

- Kepemilikan Asing

Dengan tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada kepemilikan asing (*foreign ownership*) maka pelaksanaan monitoring para pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan menjadi lemah karena pemegang saham tidak mempunyai insentif dan kemampuan untuk memonitor manajemen.

- Kepemilikan Pemerintah

Peran kepemilikan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pengendalian. Pengendalian pemerintah dapat digunakan

untuk memecahkan masalah konflik antara dewan manajemen dan para pemegang saham.

2 Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal

- Ukuran Dewan Direksi

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pfefer, 1973).

- Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Chtourou *et al* (2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik.

- Komisaris Independen

Semakin tinggi perwakilan dari pihak luar (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Barnhart dan Rosenstein, 1998)

3 Mekanisme Pemantauan Regulator

- Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*).

Pemantauan peraturan (regulator) yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah melalui persyaratan kecukupan modal / CAR juga mempengaruhi kinerja perbankan terutama dalam profitabilitas.

4 Mekanisme Pemantauan Pengungkapan

- Auditor Eksternal Big 4

Seorang auditor memainkan peran penting untuk memastikan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

f. Penerapan Corporate Governance di Perbankan

Perbankan sebagai perusahaan yang mengelola dana pihak ketiga dituntut untuk selalu terbuka dan hati-hati (*prudent*) oleh pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Di dalam peraturan tersebut tugas Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hampir serupa, yang mengkaji kompetensi komite audit, resiko litigasi dan *corporate governance* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil
1	Ahmad Juanda (2008)	Independen : Risiko Litigasi Dependen : Tipologi Strategi	Semakin tinggi risiko litigasi, semakin cenderung perusahaan menggunakan strategi defender
2	Zulfitri Ramdan (2009)	Independen : Latar belakang Pendidikan Akuntansi, Pengalaman Sebagai Auditor, Pengalamn Kerja di bidang Akuntansi. Dependen : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dipengaruhi signifikan oleh latar belakang pendidikan akuntansi, sedangkan dua variabel lain tidak signifikan.
3	Khrishnan dan Lee (2009)	Independen : Risiko litigasi, Corporate Governance (ukuran dewan, proporsi direksi eksternal, ukuran komite audit, komite audit independen, kepemilikan institusional, <i>government</i>	Perusahaan dengan risiko litigasi tinggi lebih banyak memiliki ahli akuntansi dalam komite audit, tetapi hal tersebut hanya berlaku pada perusahaan dengan

		<i>index)</i> Dependen: Ahli akuntansi dalam komite audit.	<i>corporate governance</i> yang kuat.
4	Helmi Ikhwanul Arifin (2010)	Independen : Mekanisme <i>Good Corporate governance</i> (Komisaris Indepoen, Kepemilikan Manajerial, Kepmilikan Asing, Hutang dan Kualitas Audit) Dependen : Kinerja Saham	Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan. Kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ditolak namun berpengaruh negatif. Kepemilikan saham asing tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan namun berpengaruh negative. Hutang tidak berpengaruh negatif

			<p>terhadap kinerja perusahaan. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 memiliki kinerja saham perusahaan yang lebih besar.</p>
5	Irmala Sari (2010)	<p>Independen : Besar</p> <p>Pemegang saham Pengendali, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran dewan Direksi, Ukuran dewan Komisaris, Dewan Independen, CAR, Auditor Eksternal Big 4</p> <p>Dependen : Kinerja Perbankan</p>	<p>Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Mekanisme pemantauan Pengendalian Internal menunjukkan hubungan negative signifikan.</p> <p>Mekanisme Pemantauan Regulator</p>

			<p>menunjukkan hubungan positif signifikan.</p> <p>Mekanisme pemantauan</p> <p>Pengungkapan</p> <p>menunjukkan hubungan positif signifikan</p>
--	--	--	--

Penelitian ini mengacu pada penelitian Krishnan dan Lee (2009), perbedaannya adalah penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan yang bergerak di perbankan dan menggunakan variabel yang memang digunakan untuk mengukur *corporate governance* perbankan.

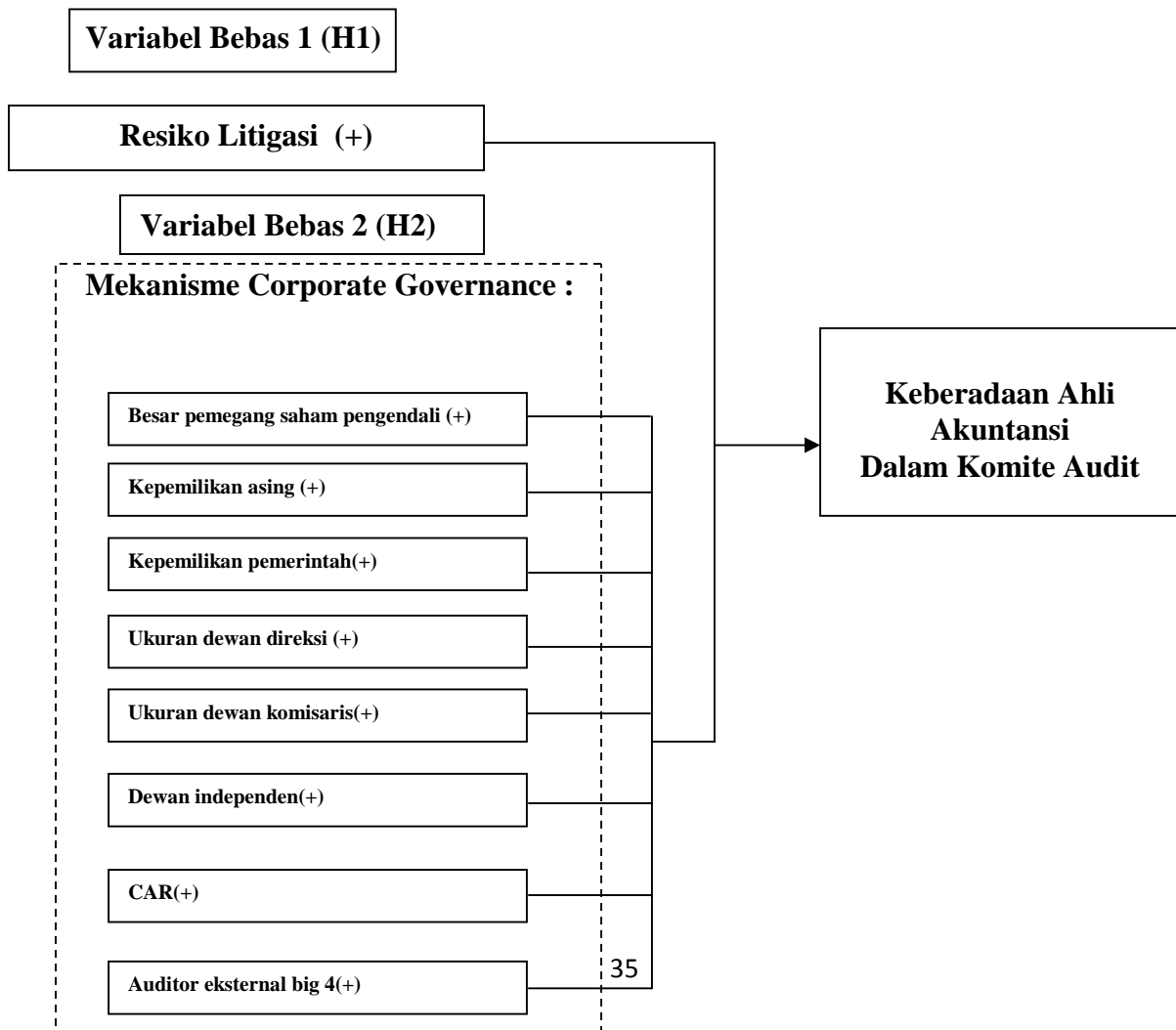
2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Variabel dependen yang menjadi fokus utama penelitian adalah jumlah keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit yang diukur dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi. Variable independen pertama adalah resiko litigasi yang diukur berdasar model penelitian Rogers dan Stocken (2005). Koefisien litigasi menurut model penelitian ini dihitung dengan menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja harga saham, yaitu nilai pasar saham, perputaran volume saham, beta saham, return saham, serta return minimal. Keuntungan dari model penelitian ini adalah menggunakan

periode data yang paling dekat dan dapat digunakan untuk sampel perusahaan secara umum, tidak hanya industry yang memiliki litigasi tinggi.

Variabel independen kedua adalah *corporate governance* yang diukur berdasarkan model penelitian Sari (2006) dengan memproksikan variable tersebut ke dalam 8 variabel yaitu : besar pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan independen, CAR, dan auditor eksternal big 4.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual, penelitian ini akan membangun hipotesis dalam menguji hubungan bagaimana masing-masing variable independen berhubungan dengan variabel dependen.

2.3.1 Risiko Litigasi dengan Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit

Keuntungan yang dimiliki oleh ahli keuangan dari bidang ekonomi akuntansi adalah mereka dapat melaksanakan fungsi pengawasan akuntansi dan laporan keuangan perusahaan. Sehingga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan pelaporan, pemeriksaan investigasi oleh pembuat kebijakan yang disertai tuntutan litigasi dapat dicegah. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa keahlian akuntansi yang dimiliki anggota komite audit dapat diasosiasikan dengan resiko litigasi yang dihadapi oleh perusahaan (Jagan Krishnan, *et al.* 2009).

Pembuat kebijakan percaya bahwa keberadaan ahli akuntansi dalam suatu komite audit akan meningkatkan efektifitas dari komite audit itu sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan perusahaan (SEC 1999c). Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bedard et al. (2004), Krishnan (2005), dan Dhaliwal et al. (2006) melaporkan bahwa keahlian akuntansi yang dimiliki oleh anggota komite

audit mempunyai peran dalam menekan manajemen laba dan internal kontrol yang lebih baik. Dengan alasan tersebut perbankan yang bergerak dalam resiko litigasi yang tinggi diperkirakan akan memiliki permintaan ahli keuangan di bidang akuntansi dalam komite auditnya.

H 1 : Resiko Litigasi (Litigation Risk) berpengaruh positif terhadap keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit.

2.3.2 Corporate Governance dengan Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit

Berdasarkan penelitian Sari (2010), untuk mengukur kekuatan *Corporate governance* perbankan digunakan delapan variabel *governance* meliputi: pemegang saham pengendali (OWN), kepemilikan asing (FOR), kepemilikan Pemerintah (GOV), ukuran dewan direksi (BOD), ukuran dewan komisaris (BOC), komisaris independen (INDB), capital adequacy ratio (CAR), kualitas auditor eksternal (BIG4).

a. Pemegang Saham Pengendali dengan Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit.

Kepemilikan perusahaan pada segelintir pihak yang memegang sebagian besar saham membuat pelaksanaan *monitoring* terhadap pihak manajemen menjadi lebih mudah. Dengan terkonsentrasinya kepemilikan, pemegang saham mempunyai kemampuan untuk

memainkan peranan dalam pengawasan manajemen, karena mereka mendapatkan kekuasaan melalui voting right (Sari, 2009).

Cai *et al.* (2001) menemukan hubungan yang berlawanan antara kinerja saham dengan kepemilikan saham institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari lima persen) mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Pendapat lain dikemukakan oleh Curtis (2007) yang menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas biasanya merupakan pemegang saham yang baik dalam arti mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga investasinya agar selalu untung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengawasan manajemen yang baik melalui komite audit. Caranya adalah dengan memastikan kompetensi anggota komite audit sudah terpenuhi. Karena itu, adanya kepemilikan saham mayoritas dalam suatu perusahaan akan menyebabkan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi akan semakin besar. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2a : Kepemilikan saham mayoritas berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

b. Kepemilikan Asing dengan Keberadaan Ahli Akuntansi Dalam Komite Audit

Kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan diketahui dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan pada periode saat akuisisi dilakukan dan periode-periode berikutnya (Arnold, *et al.* 2005). Kontribusi penting lain dari investasi asing adalah *spin-off* (tukar guling) potensial teknik-teknik manajemen barat (Che Haat, 2008; dalam Arifin, 2010). Hal tersebut sangat membantu bagi perusahaan-perusahaan khususnya di negara berkembang untuk memajukan usaha mereka.

Di Indonesia sendiri, kepemilikan asing berpotensi meningkatkan iklim persaingan antar perusahaan. Hal ini merupakan suatu hal yang positif, karena dengan meningkatnya persaingan maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk *survive* dalam persaingan tersebut. Maka dari itu perusahaan perlu meningkatkan tata kelola perusahaan/ *corporate governance* yang dimilikinya. Fungsi pengawasan/monitoring mempunyai peranan yang besar dalam hal ini. Oleh karena itu kepemilikan asing berpotensi meningkatkan

permintaan perusahaan akan ahli akuntansi dalam komite audit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2b :Kepemilikan asing berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

c. Kepemilikan Pemerintah dengan Keberadaan Ahli Akuntansi Dalam Komite Audit

Kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan rentan menimbulkan konflik kepentingan (Pargendler, 2012). Akan tetapi, kepemilikan pemerintah juga mempunyai dampak positif dengan menyediakan pengendalian manajemen yang kuat (Bai, Liu, Lu, Song, dan Zhang, 2003). Dengan adanya pengendalian yang kuat oleh pemerintah, maka pada umumnya proses *monitoring* akan menjadi isu utama dalam kegiatan operasional. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ahli akuntansi akan menjadi prioritas, sehingga jumlah mereka akan berpotensi meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2c :Kepemilikan pemerintah berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

d. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit

Dewan direksi sebagai eksekutif bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pfeffer (1973) menemukan bahwa peningkatan dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak eksternal dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Namun demikian, meningkatnya ukuran dewan direksi tentunya membutuhkan fungsi *monitoring* yang lebih handal. Maka dari itu keberadaan ahli akuntansi dalam komite audit sangat diperlukan untuk mendukung fungsi *monitoring* dan pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2d :Ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

e. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit

Tugas utama dewan komisaris dalam sebuah perusahaan adalah melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Namun demikian, sebagai pemegang fungsi monitoring dewan direksi tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al (2001), dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa komite audit, sebagai salah satu sub-organ dalam dewan komisaris memegang peranan penting dalam proses monitoring manajemen. Maka dari itu semakin meningkatnya ukuran dewan komisaris akan berpotensi menambah jumlah keberadaan ahli akuntansi. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2e :Ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

f. Pengaruh Dewan Independen Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit

Menurut penelitian Lorsch (2000), komposisi dewan komisaris yang baik adalah yang susunan anggotanya lebih banyak yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan agar anggota dewan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih maksimal. Dengan komposisi tersebut diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin muncul. Konflik tersebut dapat muncul karena apabila dewan komisaris kebanyakan berasal dari internal perusahaan atau dari pihak yang juga berkepentingan dengan performa perusahaan, maka tentunya pengawasan yang dilakukan kurang optimal karena cenderung berorientasi pada keuntungan pribadi.

Anggota Dewan Independen tentunya diharapkan mempunyai latar belakang yang sesuai dengan sektor bisnis perusahaan sehingga dapat secara efektif menunjang aktivitas perusahaan baik dari sisi operasional maupun pengawasan manajerial. Dalam perbankan tentunya keahlian akuntansi sangat diperlukan, sehingga perekrutan dewan independen dengan kompetensi tersebut potensial dilakukan. Dengan meningkatnya jumlah ahli akuntansi dalam dewan komisaris sebagai anggota independen, tentu akan meningkatkan kemungkinan

perekrutan ahli akuntansi dalam komite audit yang merupakan sub organ dalam dewan komisaris itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2f : Dewan komisaris independen berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

g. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar ratio tersebut akan semakin baik kualitas bank tersebut (Achmad dan Kusuno 2003, dalam Purwana 2009). Peningkatan kualitas perbankan menunjukkan bahwa pelaksanaan *corporate governance* sudah diterapkan dengan baik. Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan, pelaksanaan *corporate governance* yang baik akan meningkatkan kemungkinan perekrutan ahli akuntansi dalam komite audit. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2g : Capital adequacy ratio berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

h. Pengaruh Auditor Eksternal Big Four Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit

Auditor eksternal big four merupakan empat kantor akuntan yang memiliki pangsa pasar terbesar di dunia. Kantor akuntan yang berafiliasi dengan *big four* biasanya dikenal memiliki reputasi yang baik. Pentingnya reputasi bagi auditor berasal dari fakta bahwa kualitas dari audit tidak dapat dengan mudah untuk diinspeksi, sehingga reputasi sebagai tindakan yang mewakili kualitas (Waspodo, 2007). Dengan meningkatnya reputasi auditor eksternal, maka kompetensi anggota komite audit juga perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan tugas utama komite audit adalah menelaah dan memberikan rekomendasi atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2h : Auditor eksternal *big four* berhubungan positif dengan keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi dalam komite audit.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara peneliti memperoleh, dan mengolah data penelitian yang ada. Metode yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan yang terjadi antar variabel.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian dilakukan (Sekaran, 2002). Variabel dependen juga disebut variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah jumlah keberadaan ahli keuangan dari bidang akuntansi (EXPERT) dalam komite audit bank umum yang terdaftar di BEI. EXPERT dinyatakan sebagai persentase jumlah ahli keuangan dari bidang akuntansi dibandingkan jumlah anggota independen dalam dewan. Berdasarkan definisi spesifik dari DeFond *et al.* (2005), ahli keuangan akuntansi didefinisikan sebagai orang yang pernah bekerja atau sedang menjabat pekerjaan yang berkenaan dengan akuntansi atau pengauditan. Termasuk di dalamnya adalah CPAs, CFOs, CAOs, *controllers* dan auditor.

3.1.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen ini terdiri dari :

a) Resiko Litigasi

Resiko litigasi diartikan sebagai resiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi kreditor, investor, dan regulator. Risiko litigasi diukur dengan skor yang didapat dari hasil perhitungan menggunakan model Rogers dan Stocken (2005). Skor litigasi dihitung dengan menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja harga saham yaitu nilai pasar saham, perputaran volume saham, beta saham, return saham, serta return minimal (Alfiah, 2010). Nilai pasar (SIZE) merupakan nilai saham perusahaan selama satu tahun. Perputaran volume saham (TURN) merupakan rata-rata volume saham yang diperdagangkan dibandingkan dengan rata-rata saham yang beredar. Beta saham (BETA) merupakan slope koefisien dari model pasar (CML). Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu saham terhadap return pasar yang menggambarkan nilai risiko suatu saham. Return saham (RETURN) dihitung

dengan mengamati perubahan harga saham bulanan ditambah dengan besarnya deviden yang diperoleh. Return minimal (MIN_RET) merupakan perubahan harga saham bulanan yang menghasilkan return paling kecil. Untuk menentukan return saham dalam penelitian ini digunakan rumus :

$$R_i = \frac{P_{it} - (P_{it} - 1)}{P_{it} - 1}$$

Keterangan :

R_i : return saham

P_{it} : harga saham pada akhir kuartal

P_{it-1} : harga saham pada awal kuartal

Skor *LITRISK* dihitung dengan menggunakan model yang ditentukan dengan persamaan:

$$\begin{aligned} \text{LITRISK} = & -5.738 + 0.141 (\text{SIZE}) + 0.284 (\text{TURN}) \\ & + 0.012 (\text{BETA}) - 0.237 (\text{RETURN}) \\ & - 3.161 (\text{MIN_RET}) \end{aligned}$$

Keterangan :

SIZE : log natural dari nilai pasar saham

TURN : rata-rata volume saham yang diperdagangkan dibandingkan dengan rata-rata saham *outstanding*

BETA : *slope* koefisien dari model pasar (CAPM)
RETURN : *return* yang didapat
MIN_RET : *return* minimal harian

b) Kualitas *Corporate governance*

Dalam model penelitian Sari (2010), terdapat 8 variabel yang dapat dijadikan pengukuran *corporate governance*, yaitu:

1. Pemegang Saham Pengendali (*Large Shareholders*)

Menurut PBI No. 5/23/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan, *blockholders* yang memiliki saham dalam jumlah yang besar (*large shareholders*) dalam bank disebut sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang :

- a. Memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara.
- b. Memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Variabel kepemilikan

Pemegang Saham Pengendali (PSP) merupakan variabel dummy, jika perusahaan terdapat PSP (kepemilikan saham sebesar 25% atau lebih) maka dinilai 1, sedangkan jika sebaliknya maka nilainya 0.

2. Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*)

Merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (*foreign investors*) terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. Variabel kepemilikan asing merupakan variabel dummy, jika perusahaan terdapat kepemilikan asing sebesar 5% atau lebih maka dinilai 1, sedangkan jika sebaliknya maka nilainya 0. Batasan kepemilikan saham 5% karena pemilik saham di atas 5% dicatat sebagai satu pemegang saham.

3. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah (*government*) dari seluruh modal saham yang dikelola. Variabel kepemilikan pemerintah merupakan variabel dummy, jika perusahaan terdapat kepemilikan pemerintah sebesar 5% atau lebih maka dinilai 1, sedangkan jika sebaliknya maka nilainya 0.

4. Ukuran Dewan Direksi (*Large Shareholders*)

Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan (Faisal, 2005). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate governance*, jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

5. Ukuran Dewan Komisaris

Yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Beiner *et al*, 2003). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

6. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan rasio prosentase antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI),

sedikitnya sepertiga dari anggota komisaris pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI merupakan komisaris independen.

7. Capital Adequacy Ratio(CAR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana luar didalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Pada dasarnya CAR menunjukkan pemenuhan modal yang merupakan landasan bank untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Berikut adalah cara perhitungan rasio CAR

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

8. Auditor Eksternal (*Big 4*)

The Big Four adalah perusahaan jasa akuntansi internasional terbesar dan profesional yang menangani sebagian besar audit bagi perusahaan publik maupun perusahaan swasta, menciptakan oligopoli dalam audit perusahaan besar. Menurut Prinsip-prinsip OECD dan penelitian (Niinimaki, 2001) seorang auditor memainkan peran penting sebagai pengawas bank untuk memastikan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Auditor eksternal Big 4 diantaranya *Pricewater House Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, dan KPMG.*

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009, 2010, 2011. Sedangkan sampel yang akan digunakan sebagai obyek penelitian diambil dari populasi dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Ramdan, 2008), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perbankan tersebut secara berturut-turut telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga periode dari tahun 2009-2011.
2. Perbankan tersebut mengungkapkan profil komite audit yang dimilikinya.
3. Data laporan tahunan yang diperlukan untuk penelitian tersedia berturut-turut untuk periode 2009-2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari *annual report* bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2009-

2011. Data yang diambil yaitu profil perusahaan, susunan dewan komisaris, profil dewan komisaris, profil komite audit dan laporan keuangan yang telah diaudit.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Pengumpulan informasi dan data diperoleh dari annual report yang di dalamnya meliputi profil, laporan keuangan, ringkasan kinerja bank sampel yang terdaftar di BEI. Selain itu, jurnal-jurnal penelitian baik dari dalam negeri maupun luar negeri juga digunakan sebagai referensi pendukung.

3.5 Metode Analisis

Pada penelitian ini, untuk mencapai tujuan penelitian, alat analisis yang dipergunakan adalah regresi linear berganda, yang sebelumnya perlu dilakukan uji asumsi klasik. Analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variable terikat dengan beberapa variabel bebas. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{EXPERT}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LITRISK}_{it} + \beta_2 \text{OWN}_{it} + \beta_3 \text{FOR}_{it} + \beta_4 \text{GOV}_{it} + \beta_5 \text{BOD}_{it} + \beta_6 \text{BOC}_{it} + \beta_7 \text{INDB}_{it} + \beta_8 \text{CAR}_{it} + \beta_9 \text{BIG4}_{it} + \epsilon_{it}$$

Definisi variabel :

K = Banking Firms
LITRISK = Litigation Risk

EXPERT	=	Numbers of Accounting Financial Experts's Existance in Each Company's Audit Committee (percentage)
OWN	=	Large block holders/s
GOV	=	Government ownership
FOR	=	Foreign ownership
BOD	=	Board of Direction
BOC	=	Board of Commissioner Size in bank t
INDB	=	Number of Independent Commissioner in bank
CAR	=	Capital Adequacy Ratio
BIG4	=	Auditing by reputable external auditor (Big 4)
i	=	Parameters to be estimated
	=	Constanta

3.6 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Hal ini agar model regresi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimated*) (Ghozali, 2006). Asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu : uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Tes statistik yang digunakan antara lain analisis grafik histogram, normal probability plots dan Kolmogorov-Smirnovtest (Ghozali, 2006).

3.6.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendiagnosa adanya hubungan antara variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model penelitian. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *variance inflation factor (VIF)*, yang dihitung dengan rumus berikut

$$VIF = 1/Tolerance$$

Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel independen terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006). Selain menggunakan uji VIF, multikolinearitas dapat diuji dengan menggunakan korelasi (r) dimana jika korelasi (r) di atas 0,9 menunjukkan adanya multikolinearitas (Ghozali, 2006).

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Gujarati (2003) terdapat dasar untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah:

- Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4. Uji Gleyser

Uji Gleyser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dengan persamaan regresi:

$$|Ut| = \alpha + \beta X_t + vt$$

Cara melakukan Uji Gleyser dengan SPSS (Ghozali, 2006):

- a. Lakukan regresi terhadap variabel dependen.
- b. Dapatkan variabel residual (U_t) dengan cara memilih tombol Save pada tampilan windows Linear regression dan aktifkan Unstandardized residual.

- c. Absolutkan nilai residual (AbsUt) sebagai variabel dependen dengan variabel independen

3.6.5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin-Watson test*, dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah d_l , d_u , $4-d_l$, dan $4-d_u$. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi(+/-) (Muliandi, 2010).

Kriteria pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut (Ghozali, 2006) :

Tabel 3.1 Kriteria Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tdk ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tdk ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tdk ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan, serta analisis koefisien determinasi (R^2) (Ghozali, 2006).

3.7.1. Uji Statistik t

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t-test. Uji t-test dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Puspita, 2009):

1. Tentukan dan susun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
 $H_1: \beta_1 \neq 0$, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Tentukan kriteria pengujian. H_0 ditolak jika signifikansi angka lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sedangkan H_0 diterima jika signifikansi angka lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

3.7.2. Uji Statistik F

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji statistik F. Uji statistik F dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Puspita, 2009):

1. Tentukan dan susun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). H_0 : $\beta = 0$, diduga variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H_1 : $\beta \neq 0$, diduga variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Tentukan kriteria pengujian. H_0 ditolak jika signifikansi angka lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sedangkan H_0 diterima jika signifikansi angka lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

3.7.3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen menerangkan variabel dependen pada model penelitian. nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen tersebut menerangkan variabel dependen secara terbatas. Sedangkan nilai R^2 yang cukup besar, bahkan mendekati 1, berarti variabel independen menerangkan variabel dependen dengan kuat.